

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN DENGAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**DINDA NURUL DEAYU ALFIAN
NIM. 07011381823130**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dinda Nurul Deayu Alfian
NIM : 07011381823130
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 2 Januari 2001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep *Value For Money* di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi COVID-19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 1 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Dinda Nurul Deayu Alfian
NIM. 07011381823130

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN DENGAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**DINDA NURUL DEAYU ALFIAN
07011381823130**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2022

Pembimbing I

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"ANALISIS KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN DENGAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY* DI DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19"**

**Skripsi
Oleh :**

**DINDA NURUL DEAYU ALFIAN
07011381823130**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 16 Juni 2022**

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 198106052008122002

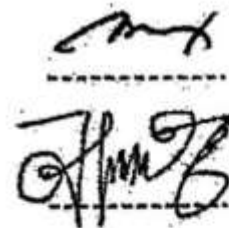
Tanda Tangan



Penguji :

1. Drs. Marlianto, M.Si.
NIP. 19621125198912601
2. Ariang Dwi Santoso, S.A.P., M.P.A.
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku, Ayahanda Alfian dan Ibunda Merry Febrianti.
2. Adikku, Ananda Zola Alfanza.
3. Keluarga, sahabat, dan teman-temanku.
4. Almamaterku.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja anggaran perubahan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19 menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep perhitungan yang menitikberatkan pada tiga prinsip utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan objek penelitian data realisasi pencapaian anggaran yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan didukung dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif pada pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan tingkat kinerja yang efisien dan efektif, namun kurang ekonomis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran belanja, meningkatkan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

Kata kunci: ekonomi, efisiensi, efektivitas, *value for money*, dan penganggaran publik.

Pembimbing I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 2003121003

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to determine the level of budget changes performance at the Culture and Tourism Department of South Sumatra Province during the COVID-19 pandemic using the value for money concept. Value for money is calculation concept that focuses on three main principles, namely economy, efficiency, and effectiveness. This research was conducted at the Culture and Tourism Department of South Sumatra Province. This research is a descriptive research with the object of research is budget realization in the Budget Realization Report (LRA) and the Accountability Report (LKPJ). The types of data used are primary data and secondary data, while the data collection methods used are documentation, observation, and supported by interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis on economic, efficiency, and effectiveness measurements. Based on the results of the research on the budget performance of the Culture and Tourism Department of South Sumatra Province during the COVID-19 pandemic, it showed an efficient and effective level of performance, but was less economical. To get optimal results, the Culture and Tourism Department of South Sumatra Province needs to improve the performance of budget management, increase the quantity and quality of human resources, and improve the procurement and maintenance of existing facilities and infrastructure.

Keywords: *economy, efficiency, effectiveness, value for money, and public budgeting.*

Pembimbing I



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 2003121003

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep *Value for Money* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19**”. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kontribusinya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alfian dan Ibunda Merry Febrianti yang telah memberikan cinta, kasih sayang yang tidak tergantikan, dukungan, serta doa-doanya selama ini.
2. Adikku tersayang, Ananda Zola Alfanza yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa-doanya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan serta membimbing penulis sejak masa perkuliahan berlangsung hingga dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan masukan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan masukan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar Dosen dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang dan Indralaya.
10. Bapak Mohamad Iqbal, S.E., M.Si. selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
11. Bapak M. Azhan Aditama, S.E., Ak. selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
12. Ibu Endang Widayanti, S.E., Ak., M.Si. selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV (IRTU IV) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Seluruh keluarga besar DISBUDPAR Sumsel, khususnya para pegawai Subbagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang telah membantu penulis selama penelitian skripsi ini berlangsung.
14. Sahabat seperjuanganku tersayang, Mohd. Faisal Djulana, Vetri Ayu Sari, Safa Tasya Anomi, Nur Sely Salsabila, Selvia Oktiriani, Salsabila Pratiwi, Putri Harisa Mawaddah, Age Bagaskoro, dan Andre Trio Iqbal yang selalu menghibur dan memberikan dukungan, saran, serta semangat kepada penulis sejak masa mahasiswa baru hingga diakhir masa perkuliahan.

15. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Palembang, Juni 2022
Penulis

Dinda Nurul Deayu Alfian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Keuangan Negara	16
2. Kinerja Anggaran	20
3. Perubahan Anggaran.....	24
4. <i>Value for Money</i>	29
5. <i>Coronavirus Disease (COVID-19)</i>	34
6. Pengukuran Kinerja Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi COVID- 19	36
B. Teori dan Konsep yang Digunakan.....	39
C. Penelitian Terdahulu	41
D. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Definisi Konsep	47
C. Fokus Penelitian.....	48
D. Unit Analisis Data.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
1. Jenis Data.....	49
2. Sumber Data	50
F. Informan Penelitian.....	50
G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
H. Teknik Analisis Data.....	53
I. Sistematika Penulisan	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	57

1. Profil Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	57
2. Lokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	58
3. Jenis Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	58
4. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	58
5. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	60
6. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	60
7. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	62
B. Hasil Analisis	84
1. Analisis Ekonomi (<i>Input</i>)	85
2. Analisis Efisiensi (<i>Output</i>)	124
3. Analisis Efektivitas (<i>Outcome</i>).....	136
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Keterbatasan Penelitian.....	151
C. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020	7
Tabel 2	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020	9
Tabel 3	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	11
Tabel 4	Kriteria Tingkat Pengukuran Ekonomi.....	31
Tabel 5	Kriteria Tingkat Pengukuran Efisiensi	32
Tabel 6	Kriteria Tingkat Pengukuran Efektivitas	33
Tabel 7	Penelitian Terdahulu yang dapat dibandingkan dengan Analisis Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep Value for Money di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi COVID-19	41
Tabel 8	Fokus Penelitian.....	49
Tabel 9	Kriteria Tingkat Pengukuran Ekonomi.....	86
Tabel 10	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020	87
Tabel 11	Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020.....	93
Tabel 12	Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2020	94
Tabel 13	Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2020.....	97
Tabel 14	Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun Anggaran 2020.....	99
Tabel 15	Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun Anggaran 2020	100
Tabel 16	Realisasi Program Pengembangan Nilai Budaya Tahun Anggaran 2020	102
Tabel 17	Realisasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun Anggaran 2020.....	103
Tabel 18	Realisasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2020	106
Tabel 19	Realisasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2020	107
Tabel 20	Realisasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tahun Anggaran 2020	108
Tabel 21	Realisasi Program Pengembangan Kemitraan Tahun Anggaran 2020.....	110
Tabel 22	Realisasi Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Tahun Anggaran 2020	112
Tabel 23	Hasil Pengukuran Dimensi Ekonomi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.....	114
Tabel 24	Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	116
Tabel 25	Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan.....	117
Tabel 26	Penempatan Tenaga Honorer.....	117
Tabel 27	Komposisi Pendidikan ASN.....	118

Tabel 28	Komposisi Pendidikan Tenaga Honorer	118
Tabel 29	Sarana dan Prasarana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	120
Tabel 30	Kriteria Tingkat Pengukuran Efisiensi	125
Tabel 31	Indikator <i>Input</i> dan <i>Output</i> Program/Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020	126
Tabel 32	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020	135
Tabel 33	Hasil Pengukuran Dimensi Efisiensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.....	136
Tabel 34	Kriteria Tingkat Pengukuran Efektivitas	137
Tabel 35	Capaian Keberhasilan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dari Program/Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020	138
Tabel 36	Hasil Pengukuran Dimensi Efektivitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.....	140
Tabel 37	Matrik Temuan Penelitian	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema <i>Value for Money</i>	34
Gambar 2	Skema Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 3	Bagan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	62
Gambar 4	Gedung Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	122
Gambar 5	Halaman Parkir Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	122
Gambar 6	Kondisi Ruangan Kantor di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	123
Gambar 7	Peralatan Mesin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	123
Gambar 8	Perabotan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	124

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease-19</i>
DISBUDPAR	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKE	: Lembar Kerja Evaluasi
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
Monpera	: Monumen Perjuangan Rakyat
OKI	: Ogan Komering Ilir
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Penerimaan Asli Daerah
PEP	: Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PHL	: Pegawai Harian Lepas
PPS	: Putra Putri Sriwijaya
RENSTRA	: Rencana Strategis
RI	: Republik Indonesia
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPBU	: Rencana Pemeliharaan Barang Unit
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
TDUP	: Tanda Daftar Usaha Pariwisata
TMII	: Taman Mini Indonesia Indah
TPKS	: Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya
TV	: Televisi
TVC	: Televisi <i>Commercial</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
TWKS	: Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Dinas
WBTB : Warisan Budaya Tak Benda
WHO : *World Health Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, pemerintah Indonesia secara masif melakukan serangkaian usaha pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik secara struktur maupun infrastrukturnya demi mewujudkan konsep *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance* merupakan konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah dan warga negara bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Kamaluddin, 2019:222). Dimana konsep tersebut akan diberlakukan pada instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Munculnya pemberlakuan konsep *good governance* ini mendorong munculnya isu-isu utama masalah sektor publik, yakni tuntutan dilakukannya reformasi sektor publik yang diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan bertanggung jawab, serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.

Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian Keuangan Negara dapat dilihat dalam arti luas maupun arti sempit, dalam arti luas Keuangan Negara meliputi kegiatan pemerintah di sektor publik. Sementara Keuangan Negara dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pemerintah dalam mencari sumber dana dan kemudian membelanjakannya.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara, pemerintah berperan untuk memanfaatkan keuangan negara dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja maupun kegiatan yang telah direncanakan. Tentunya untuk merealisasikan program kerja tersebut, pemerintah memerlukan sejumlah biaya yang dikenal dengan anggaran. Anggaran ialah pernyataan terkait estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018:75). Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Mahsun, dkk. (2018:65) berpendapat bahwa secara rinci anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.

Anggaran merupakan salah satu instrumen penting karena banyaknya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang terus berkembang, sementara sumber daya yang ada pun terbatas. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD sebagai suatu rencana keuangan mengandung arti bahwa pemerintah daerah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan daerah atau pengelolaan pemerintahan. Proses penyusunan rencana keuangan organisasi sektor publik dengan cara menyusun rencana kerja dalam periode waktu satu tahun dalam satuan moneter ini disebut juga dengan penganggaran (*budgeting*). Tentunya berbagai rancangan penyusunan anggaran

belanja direncanakan untuk alokasi dalam beragam program kerja guna pembangunan negara Indonesia secara optimal. Namun, terdapat juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan perencanaan pada penganggaran tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

Tiba-tiba munculnya suatu virus baru yang menular sangat menggemparkan Indonesia pada awal maret tahun 2020. Virus ini pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus ini sebagai pandemi, artinya virus ini telah menyebar secara luas pada setiap negara di seluruh dunia. WHO memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) serta nama penyakitnya sebagai *Coronavirus Disease* (COVID-19) (WHO, 2020). Sejak kemunculan kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020, total kasus sembuh COVID-19 di Indonesia hingga sekarang mencapai 4.115.149 orang dan kasus positif mencapai 4.264.136 orang (Covid.go.id, 5 Januari 2022). Peningkatan korban jiwa yang sangat drastis tentu berdampak pada segala aspek, baik sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Untuk itu, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perppu tersebut pada bagian kesatu, yakni Penganggaran dan Pembiayaan Pasal 2 Ayat (1) Huruf (c) bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi,

antarfungsi, dan/atau antarprogram. Kemudian pada bagian kedua, yakni Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (2), yakni ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) tersebut, maka pemerintah daerah berpedoman pada Permendagri untuk melakukan *refocussing* anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB VII Bagian Kedua Pasal 161 Ayat (2), yaitu perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Karena pemerintah telah menetapkan wabah virus COVID-19 di Indonesia sebagai Keadaan Luar Biasa, maka dijelaskan lagi secara lebih rinci pada Bagian Ketujuh Pendanaan Luar Biasa Pasal 167 Ayat (1) dan (2) bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima

puluh persen).

Kemudian, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan instruksi tersebut, dibuktikan dengan semakin merebaknya penyebaran virus COVID-19 maka Presiden RI memerintahkan seluruh jajaran Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan yang menyegerakan penanganan pandemi COVID-19 serta mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Mahsun (2018:25), kinerja (*performance*) ialah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Untuk itu, diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menilai seberapa jauh kemajuan dari pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, maupun visi dan misi organisasi sektor publik, salah satunya ialah dengan konsep *value for money*.

Pengukuran kinerja *value for money* merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi suatu program/kegiatan pada organisasi sektor publik (Mahmudi, 2015:83). Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan

yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sehingga kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendesak peningkatan kebutuhan atas suatu pengukuran kinerja, dimana pengukuran kinerja tersebut akan membuktikan seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat indikator di atas, salah satunya dengan analisis konsep *value for money*. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo dalam (Maryanti dan Munandar, 2021:2888) menyampaikan bahwa konsep *value for money* merupakan perhitungan yang menitikberatkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagai prinsip penting pengelolaan anggaran pemerintah yang ekonomis dengan meminimalkan input dengan menghindari pemborosan pengeluaran, efisien dengan mencapai output maksimal dengan input minimal, dan efektif dengan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak dan pengaruh yang cukup besar di berbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor kebudayaan dan pariwisata. Hal inilah yang sedang dirasakan oleh salah satu instansi pemerintah di Indonesia, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp70.533.000,- tidak mencapai target dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar Rp95.200.000,- dengan rasio 74,09%. Sejumlah objek pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan sumber pemasukan untuk sektor pariwisata terpaksa harus ditutup akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan beberapa *event* kebudayaan dan pariwisata pun juga terpaksa dibatalkan. Hal ini merupakan penyebab

menurunnya alokasi anggaran yang didapatkan oleh DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, ditambah lagi dengan adanya *refocussing* anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dialokasikan anggarannya untuk penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan/pemangkasan anggaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah faktor *uncontrollable* yaitu suatu keadaan yang ternyata tidak seperti yang diprediksi sejak awal. Keadaan luar biasa, yakni pandemi COVID-19 ini memaksa instansi pemerintah, termasuk DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan suatu perubahan/pemangkasan anggaran. Dimana pada masa pandemi COVID-19, anggaran program/kegiatan terutama yang melibatkan orang banyak tidak dapat terserap atau terealisasi secara ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan konsep *value for money*, sehingga saat ini lebih baik jika anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tentu saja adanya perubahan anggaran di masa pandemi COVID-19, dengan anggaran yang secukupnya untuk melaksanakan suatu program/kegiatan tentu akan berpengaruh pada capaian kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Forester dan Mullins dalam (Abdullah, dkk., 2020:30), perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja, memperbaiki capaian kinerja, dan mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Berikut ini data realisasi anggaran perubahan belanja langsung DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2020:

Tabel 1
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.531.200.000	2.877.150.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	789.518.000	909.518.000

Lanjutan Tabel 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000	77.224.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.000.000	125.000.000
5.	Program Pengembangan Nilai Budaya	250.000.000	260.275.000
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.225.000.000	1.580.456.750
7.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	770.000.000	748.200.000
8.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	200.000.000	200.000.000
9.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.827.500.000	2.599.072.950
10.	Program Pengembangan Kemitraan	775.000.000	299.820.000
11.	Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya	5.205.000.000	4.632.000.000
Jumlah (Rp)		16.818.218.000	14.308.716.700

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran belanja langsung sebelum perubahan adalah sebesar Rp16.818.218.000, kemudian setelah mengalami perubahan menjadi Rp14.308.716.700. Artinya, telah terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp2.509.501.300. Hal ini disebabkan karena adanya *refocussing* anggaran guna untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa program mengalami pengurangan anggaran dikarenakan anggaran kegiatan pada program tersebut dikurangi untuk mengutamakan program lain yang menjadi prioritas saat ini, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Pengembangan Nilai Budaya.

Seluruh kegiatan mengalami suatu perubahan anggaran di DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan. Dimana terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dengan persentase penurunan sebesar 50,00% bahkan hingga 100,00%. Berikut

data kegiatan DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan anggaran dengan persentase penurunan 50,00% hingga 100,00%, diantaranya:

Tabel 2
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	0	(100,00%)
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	50.000.000	20.000.000	(60,00%)
3.	Pengelolaan Data Terpadu Menuskrip Sumatera Selatan dalam Rangka Pelestarian Warisan Budaya	50.000.000	25.000.000	(50,00%)
4.	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata	50.000.000	25.000.000	(50,00%)
5.	Festival Sriwijaya	600.000.000	0	(100,00%)
6.	Promosi Pariwisata di Luar Negeri	200.000.000	8.150.000	(95,93%)
7.	Napak Tilas Perjalanan Cheng Ho	200.000.000	1.100.000	(99,45%)
8.	South Sumatra Famillirization Trip (<i>Fam Trip</i>)	100.000.000	0	(100,00%)
9.	Penampilan Seni Budaya Sumsel pada Event-event Kebudayaan dan Pariwisata	550.000.000	96.500.000	(82,45%)
10.	Pergelaran Pameran Seni Se-Sumatera	100.000.000	0	(100,00%)
11.	Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia	230.000.000	5.958.000	(97,41%)
12.	Tatakelola Warisan Budaya Takbenda	200.000.000	98.698.000	(50,56%)
13.	Pembuatan Profil Kebudayaan Sumsel	75.000.000	37.500.000	(50,00%)
14.	Pergelaran Seni Budaya Sumsel di TMII	200.000.000	0	(100,00%)
15.	Pelestarian Bahasa Daerah	75.000.000	0	(100,00%)
16.	Pemilihan Putra Putri Sriwijaya	300.000.000	11.600.000	(96,13%)
17.	Penyusunan Paket Destinasi Wisata Religi	200.000.000	69.851.000	(65,07%)
18.	Gebyar Wisata	100.000.000	3.800.000	(96,20%)
19.	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Subsektor Ekonomi Kreatif	75.000.000	16.505.000	(77,99%)

Lanjutan Tabel 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

20.	Partisipasi Bersama Regional, dan Museum Negeri	Pameran Tk. Lokal, dan Nasional	275.000.000	0	(100,00%)
21.	Partisipasi Sriwijaya pada Nasional	Museum Pameran Tk. Nasional	150.000.000	0	(100,00%)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa terdapat 21 kegiatan pada DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan anggaran dengan persentase sebesar 50,00% hingga 100,00%. Hal ini sesuai yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana ini termasuk dalam kategori perubahan anggaran yang terjadi karena keadaan luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan ataupun penurunan yang lebih besar dari 50%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Iqbal, S.E., M.Si. selaku Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa:

“Refocussing anggaran tentu saja berdampak pada capaian kinerja program/kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa program/kegiatan yang dikurangi anggarannya. Pemangkasan anggaran dilakukan pada kegiatan yang melibatkan banyak orang, kerumunan, dan beresiko terkait dengan pandemi COVID-19, serta semua anggaran yang sifatnya tidak mendesak harus ditunda. Beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana seperti yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang, yakni kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Festival Sriwijaya, *Fam Trip*, Pergelaran Pameran Seni Se-Sumatera, Pergelaran Seni Budaya Sumsel di TMII, Pelestarian Bahasa Daerah, Partisipasi Pameran Bersama Tk. Lokal, Regional, dan Nasional Museum Negeri, dan Partisipasi Museum Sriwijaya pada Pameran Tk. Nasional. Kegiatan yang ditunda atau dibatalkan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19, misalnya anggaran kegiatan yang di-*refocussing* tersebut dialokasikan untuk pengadaan tempat cuci tangan, pengadaan *hand sanitizer* di lingkungan kantor, dsb. Jadi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memilih kegiatan tersebut untuk sama sekali tidak dilaksanakan sehingga tidak berdampak pada program/kegiatan lainnya.”

(05/01/22)

Sebelum adanya pandemi COVID-19 pagu anggaran DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan terbilang cukup besar jumlahnya. Adapun pagu anggaran belanja langsung DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan sebelum dan setelah pandemi ialah sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Pagu	Rp22.546.658.000,-	Rp14.308.716.700,-
Realisasi	Rp20.537.034.502,-	Rp12.908.597.728,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang dimiliki oleh DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19. Pagu anggaran belanja langsung sebelum pandemi di tahun anggaran 2019 adalah Rp22.546.658.000,- dan terealisasi sebesar Rp20.537.034.502,- sedangkan setelah pandemi di tahun anggaran 2020 terjadi perubahan anggaran, pagu anggaran menjadi Rp14.308.716.700,- dan terealisasi Rp12.908.597.728,-. Dari data yang didapatkan tersebut, diketahui terdapat sisa anggaran pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 ialah sebesar Rp1.400.118.972,-.

DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan memerlukan dana/biaya yang cukup untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan. Adanya perubahan anggaran pada masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan beberapa program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar dengan persentase 50,00% bahkan hingga 100,00% sehingga pagu anggaran selama satu periode anggaran menjadi lebih sedikit. Program/kegiatan yang telah dicanangkan oleh DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan tidak berjalan dengan baik seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kinerja anggaran DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan. Untuk

itu, dengan memanfaatkan anggaran yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan harus mampu meningkatkan capaian program/kegiatan secara optimal dengan hasil yang baik pula.

Mardiasmo dalam (Suyatin, 2015:186) menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu agar pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sementara itu, kinerja instansi pemerintah kini sedang menjadi buah bibir, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Maka dari itu, adanya suatu pengukuran kinerja akan membuktikan seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah.

Indrayani dan Khairunnisa (2018) meneliti tentang “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)”. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran periode tahun 2014-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio ekonomis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2014-2016 bernilai 86,54%, 82,64%, 71,43%, yang berarti bernilai ekonomis. Pada tahun 2014 nilai rasio efisiensi yang di peroleh senilai 94,69% dan pada tahun 2015 naik menjadi 105,17% dan turun menjadi 97,95% pada tahun 2016, meskipun pada tahun 2015 menunjukkan rasio yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe telah efisien, karena rasio yang dicapai kurang dari 100% atau

semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien. Kemudian, rasio efektifitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe periode 2014-2016 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektifitas yang bernilai kurang dari 100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.

Maryanti dan Munandar (2021) meneliti tentang “Analisis *Value For Money* untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019”. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan data sekunder dari *website* Pemerintah Kota Surabaya dan *website* Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya untuk mengukur tingkat ekonomis, tingkat efisiensi, dan efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015-2019. Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015-2019 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Kemudian, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.

Perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada objek penelitian, fokus penelitian, dan periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) serta Maryanti dan Munandar (2021), yakni pada Pemerintah Daerah Kota sebagai objeknya dengan periode penelitian selama 3 hingga 5 tahun untuk mengetahui kinerja keuangan dengan konsep *value for money*. Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *value for money* dalam mengukur kinerja instansi pemerintah tingkat Provinsi, yakni DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan. Fokus penelitian penulis ialah dengan konsep yang serupa, yaitu *value for money* yang menekankan pada tiga dimensi, yakni ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas. Namun, disini penulis lebih berfokus untuk mengukur kinerja anggaran perubahan. Selanjutnya, periode penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni pada masa pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.

Melihat dari uraian permasalahan yang ada dan perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka memotivasi penulis untuk dapat meneliti lebih dalam terkait kinerja anggaran perubahan dengan menggunakan konsep *Value for Money* dimana terdapat tiga dimensi utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Karena kinerja pemerintah tidak dapat hanya dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi juga harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama, maka dari itu penulis perlu meneliti lebih lanjut dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep *Value for Money* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu Bagaimana Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep *Value for Money* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka didapatkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep *Value for Money* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Kinerja Anggaran Perubahan dengan Konsep *Value for Money* di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada bidang konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal, serta dapat berguna sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, serta dapat menjadi masukan atau saran bagi perkembangan pemerintahan khususnya kepada DISBUDPAR Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan kajian dalam lingkup studi mengenai kinerja anggaran perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202.
- C. Susi Maryanti, A. M. (2021). Analisis *Value for Money* untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah IMEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899.
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliani, D., & Herdana, S. V. (2019). *The Impact of Bullying on the Confidence of Elementary School student*. *Jurnal Pendas Mahakam*, 4(2), 152–157.
- Cresswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. 2016. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ferdy Leuhery. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Disiplin Kerja, dan Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. *Jurnal SOSOQ Volume 6 Nomor 1, Februari 2018*, 6(2).
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value for Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Junita, A. (2018). Perubahan Anggaran, Partisipasi Anggaran, dan Gaya Kepemimpinan Pada Pemerintah Daerah (Bukti Empiris dari Perspektif *Goal-Setting* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Aceh). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 2(2), 93–107.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- Kariyoto, K. (2017). Implementasi *Value For Money, Input Output Outcome* dan *Best Value* Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 72–82.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M., dkk. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 327–340.
- Nugraha, A. S. (2020). Kearifan Lokal dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: Sebuah Kajian Literatur. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(1), 745–753.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 87–96.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value for Money* pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(2), 265–278.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sunarti. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 63–79.
- Suparman, N. (2021). *Indonesian Treasury Review*. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45.
- Suwandi, M. M. (2017). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif *Value for Money*. 6(2), 456–477.
- Suyatin. (2015). Pengukuran Kinerja dalam Penguatan Manajemen Strategis Organisasi Sektor Publik. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 31(2), 183–198.
- Syukriy Abdullah, S. A., Yulinda Kusyanti, Y. K., & Nadirsyah, N. (2020). Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Bukti Empiris dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, 2010-2014). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 26–48.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode *Value for Money* Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354–361.